

Analisis Angka Partisipasi Sekolah (APS) Rendah Pada Pendidikan Anak Usia Dini: Perspektif, Tantangan, Dan Solusi di Kabupaten Kuningan Jawa Barat

Yoga Aditia Ragil

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: yogaaditiragil@umj.ac.id

Sriyanti Rahmatunnisa

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: sriyanti_rachmatunnisa@yahoo.com

Munifah Bafen

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: munifah.bahfen@umj.ac.id

Article received: 11 Februari 2025, Review process: 30 July 2025,
Article Accepted: 25 August 2025, Article published: 30 September 2025

ABSTRACT

This study is motivated by the low School Participation Rate (SPR) in Early Childhood Education (ECED) in Kuningan District despite various regulations and programs that have been issued to support the expansion of access to services. This condition indicates a gap between policy and practice in the field, so a thorough analysis is needed to understand the main contributing factors to the low participation of children in PAUD services. This study used a qualitative approach with the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model, where data were obtained through in-depth interviews with local education stakeholders, observation of ECD services, and documentation study of policy and administrative data, then analyzed thematically according to the CIPP dimensions. The findings reveal that low APS is influenced by family economic factors, socio-cultural conditions and community perceptions, limited regional access and service quality, and suboptimal local policy implementation in raising public awareness and participation in the importance of PAUD. Based on these results, the study recommends strengthening cross-sector coordination, increasing funding and data utilization in program planning, as well as a sustained public campaign to encourage increased APS and equitable expansion of ECD services in Kuningan District.

Keywords: APS; ECD; Policy of ECD

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kuningan meskipun berbagai regulasi dan program telah diterbitkan untuk mendukung perluasan akses layanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan analisis menyeluruh untuk memahami faktor penyebab utama rendahnya partisipasi anak dalam layanan PAUD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input,

Process, Product), di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan pendidikan daerah, observasi layanan PAUD, dan studi dokumentasi kebijakan serta data administratif, kemudian dianalisis secara tematik sesuai dimensi CIPP. Temuan penelitian mengungkap bahwa rendahnya APS dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, kondisi sosial-budaya dan persepsi masyarakat, keterbatasan akses wilayah dan mutu layanan, serta implementasi kebijakan daerah yang belum optimal dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap pentingnya PAUD. Berdasarkan hasil ini, penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pendanaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan program, serta kampanye publik berkelanjutan untuk mendorong peningkatan APS dan perluasan layanan PAUD yang merata di Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: APS; PAUD; Kebijakan PAUD

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu yang esensial untuk menggali dan mengoptimalkan potensi diri dalam rangka membentuk pribadi yang cerdas dan berdaya saing. Proses pendidikan mencakup pengembangan aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap melalui berbagai pengalaman belajar yang bermakna. *Education is a transformative journey that nurtures individuals intellectually and morally, emphasizing the integral link between learning and personal development* (Sofradzija et al., 2021). Salah satu jenjang pendidikan yang terdapat di Indonesia adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD merupakan bentuk layanan pendidikan yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sejak masa awal kehidupan. PAUD menyasar anak dari usia 0 hingga 6 tahun, dengan tujuan memberikan stimulasi dan pembinaan melalui pendekatan pendidikan yang terstruktur guna menunjang kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, baik dari aspek fisik maupun psikososial (Kemendikbud, 2014).

PAUD bertujuan untuk memberikan stimulasi fisik, emosional, sosial, dan intelektual agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Program PAUD biasanya meliputi kegiatan bermain, pembelajaran, dan interaksi sosial yang mendukung perkembangan holistik anak. Pasal 31 ayat (1) pada Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta pemerintah selalu mengupayakan peningkatan kualitas dan memastikan akses pendidikan yang adil untuk semua (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2002). Upaya tersebut dikuatkan kembali tentang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam mengupayakan tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan ketentuan paling sedikit terdapat satu satuan PAUD di setiap desa atau kelurahan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan lembaga PAUD diatur dalam Permendikbudristek yang menyatakan bahwa Standar Pengelolaan merupakan acuan minimal yang memuat kriteria terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan oleh Satuan Pendidikan, guna memastikan penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara efisien dan efektif (Mendikbud, 2023).

Namun dari beberapa regulasi yang ada, tidak membuat proses pembelajaran untuk anak usia dini berjalan dengan semestinya. Masih banyak anak rentan usia 0

– 8 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Beberapa faktor yang menjadikan banyak anak usia dini yang belum mendapatkan layanan pendidikan diantaranya sesuai dengan hasil penelitian dari Suharti adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya PAUD bagi perkembangan anak (Suharti, 2018). Perhatian orang dan kesadaran diri yang kurang tentang pendidikan (Lanawaang & Mesra, 2023). Perhatian orang tua dan kesadaran diri yang rendah tentang pentingnya pendidikan juga menjadi faktor penghambat. Ketika orang tua tidak menyadari manfaat PAUD, mereka mungkin tidak memprioritaskan pendidikan awal untuk anak-anak mereka.

Data nasional menunjukkan bahwa capaian partisipasi PAUD masih berfluktuasi dan belum merata antar wilayah. Berdasarkan laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun ajaran 2019/2020 (Kemendikbud, 2020) hingga 2020/2021 (Kemendikbud, 2021), Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di tingkat provinsi menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa provinsi di Pulau Jawa dan kota besar mencatat tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi di luar Jawa, terutama wilayah dengan karakteristik kependudukan terpencil dan tantangan akses. Perubahan pada dua tahun tersebut juga menunjukkan bahwa kenaikan partisipasi belum terjadi secara konsisten, sehingga tidak seluruh daerah mengalami peningkatan ketersediaan layanan PAUD pada periode yang sama.

Ketimpangan ini semakin terlihat ketika data dianalisis berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa anak dari kelompok rumah tangga pada kuintil pengeluaran tertinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengikuti PAUD dibandingkan kuintil terbawah. Dengan kata lain, akses terhadap layanan PAUD masih berhubungan langsung dengan kemampuan ekonomi keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin dan rentan tercatat lebih jarang terdaftar di lembaga PAUD, sehingga program perluasan akses belum sepenuhnya menyentuh kelompok sasaran prioritas ((BPS), 2023). Selain kesenjangan antarwilayah dan ekonomi, data BPS juga merekam variasi capaian APK antardaerah selama tiga tahun terakhir. Meskipun terdapat tren peningkatan di beberapa provinsi tertentu, wilayah dengan keterbatasan jaringan layanan, minimnya lembaga PAUD, dan kondisi geografis sulit termasuk wilayah pedesaan dan pinggiran masih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini memperkuat temuan bahwa pemerataan layanan PAUD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan nasional, tetapi juga kemampuan daerah dalam menyediakan sarana, tenaga pendidik, dan dukungan pembiayaan.

Latar belakang pendidikan orang yang terdekat dengan anak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anak tidak tersentuh layanan pendidikan PAUD. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Wassahua yang menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua berdampak pada minimnya pemahaman mereka terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka (Wassahua, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua dengan pendidikan yang rendah cenderung memiliki pemahaman yang kurang tentang pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak, sehingga mereka mungkin tidak mendaftarkan anak mereka ke PAUD. Selanjutnya penelitian Hakim menjelaskan bahwa pendidikan kepala rumah tangga yaitu SMP (Hakim, 2020). Orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai mungkin kurang menyadari manfaat jangka panjang dari

PAUD, sehingga anak-anak mereka berisiko tidak mendapatkan stimulasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan anak.

Keterbatasan aksesibilitas dapat menjadi hambatan yang signifikan, sehingga menurunkan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kondisi geografis yaitu jauhnya jarak sekolah yang harus ditempuh oleh anak akan cenderung mengakibatkan anak tidak mendapatkan layanan pendidikan (Asmara & Sukadana, 2016). Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah sering kali menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Dari sisi pemerintah masih kurangnya pemerataan dalam pendataan oleh pemerintah setempat dalam merespons program pendidikan menyebabkan masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh atau tidak mendapatkan akses terhadap program tersebut (Saepuloh & Suherman, 2019). Kurangnya pendataan yang merata dari pemerintah setempat terkait program pendidikan dapat membuat banyak keluarga yang kurang mampu tidak mengetahui atau tidak mendapatkan akses ke layanan pendidikan yang tersedia. Sementara itu peran sekolah juga memegang peranan yang tak kalah penting dalam membentuk kesiapan anak untuk memasuki dunia pendidikan formal (Keguruan & Pendidikan, 2017). Peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi proses belajar sangat berpengaruh terhadap kesiapan anak untuk belajar dan beradaptasi.

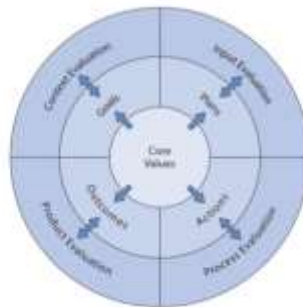
Beberapa peraturan yang ada saat ini untuk memastikan hak setiap warga layak mendapatkan pendidikan, serta peningkatan kualitas dari satuan PAUD telah terbit. PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada dasarnya bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memperoleh layanan pendidikan dasar minimal selama sembilan tahun secara merata dan berkelanjutan. Kaitannya dengan PP Nomor 47 Tahun 2008, pelayanan PAUD berperan sebagai upaya preventif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di usia dini, sehingga anak-anak yang berpartisipasi di PAUD lebih siap untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan dasar yang diwajibkan oleh kebijakan ini. Serat Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2018 bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan PAUD di Indonesia. Kebijakan ini mengatur penyediaan layanan PAUD yang holistik dan terintegrasi, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, serta perlindungan anak.

Melihat berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah pusat maupun daerah, serta fakta bahwa masih banyak anak usia 0–6 tahun yang belum tersentuh layanan PAUD secara memadai, tampak jelas adanya kesenjangan antara mandat kebijakan dengan kondisi partisipasi nyata di lapangan. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu wilayah yang mengalami tantangan tersebut, sebagaimana terlihat dari capaian APK/APS yang belum menunjukkan peningkatan sejalan dengan perluasan program PAUD. Kondisi ini memperlihatkan urgensi untuk menelusuri faktor penyebab rendahnya partisipasi serta memahami bagaimana kebijakan, implementasi layanan, dan persepsi masyarakat berinteraksi membentuk realitas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis rendahnya APS PAUD di Kabupaten Kuningan melalui perspektif berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi hambatan struktural maupun sosiokultural yang dihadapi, serta menawarkan alternatif solusi yang dapat menjadi rujukan perumusan strategi peningkatan partisipasi anak dalam layanan PAUD. Melalui kajian ini, diharapkan muncul rekomendasi berbasis bukti yang dapat memperkuat arah kebijakan dan praktik penyelenggaraan PAUD di tingkat daerah.

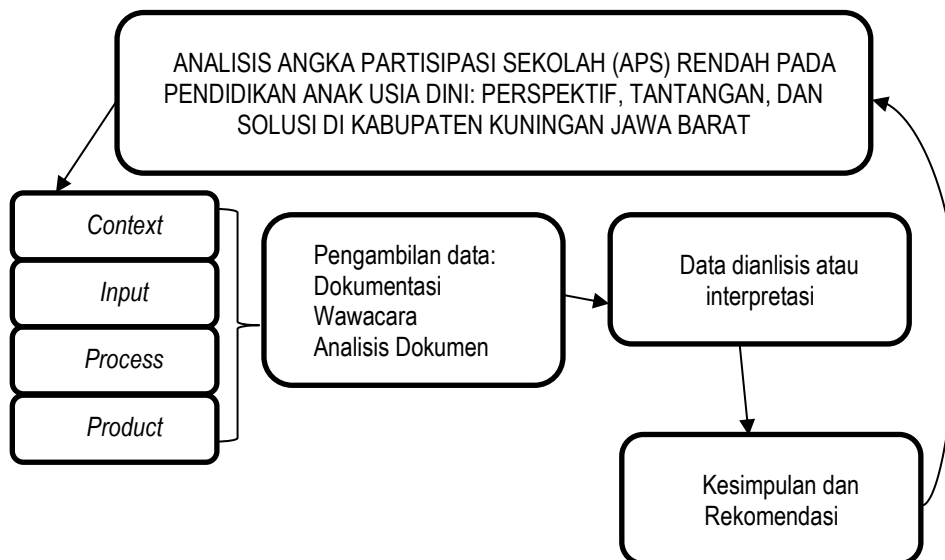
METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pandangan, dan perilaku individu dalam konteks tertentu. Metode ini menekankan pada proses pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diorganisasikan ke dalam kategori, diuraikan dalam unit-unit makna, disintesiskan, dan disusun ke dalam pola-pola tertentu hingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti maupun pihak lain (Saleh, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi program dengan mengacu pada model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini mencakup evaluasi formatif dan sumatif untuk menilai secara menyeluruh konteks, masukan, proses pelaksanaan, serta hasil dari program yang diteliti (Stufflebeam & Coryn, 2014).



Gambar 1. Komponen dari CIPP



Gambar 2. Model evaluasi

Meskipun analisis penelitian ini berlandaskan model evaluasi CIPP, penyajian temuan tidak mengikuti pemisahan langsung komponen *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*, tetapi disusun berdasarkan empat aspek tematik penelitian, yaitu implementasi kebijakan, persepsi pemangku kepentingan, faktor penentu keberhasilan, dan efektivitas kebijakan dalam peningkatan APS PAUD. Analisis pada

penelitian ini memfokuskan terhadap beberapa kebijakan yang relevan dalam mengukur APS pada jenjang PAUD.

Kisi-kisi instrumen evaluasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD di Kabupaten Kuningan. Pengembangan instrumen merujuk pada empat aspek utama, yaitu implementasi kebijakan, efektivitas kebijakan dalam meningkatkan akses layanan PAUD, persepsi pemangku kepentingan terhadap kebijakan PAUD, dan faktor penentu keberhasilan yang terkait dengan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program PAUD. Kisi-kisi dapat dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Aspek Penilaian	Indikator Pengukuran	Sumber Data
1	Implementasi Kebijakan	Pemahaman pemangku kepentingan tentang kebijakan	Dinas Pendidikan
2	Efektivitas Kebijakan	Aksesibilitas layanan PAUD bagi anak usia dini	Dinas Pendidikan
3	Persepsi Pemangku Kepentingan	Persepsi mengenai dampak kebijakan pada anak usia dini	Dinas Pendidikan
4	Faktor Penentu Keberhasilan	Tingkat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah	Dinas Pendidikan

Seluruh informasi diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendataan, perencanaan, dan penyelenggaraan layanan PAUD di wilayah tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pendidikan, serta ditunjang oleh studi dokumentasi berupa laporan tahunan, data APS, dan dokumen kebijakan daerah terkait program PAUD. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengkodean awal, identifikasi kategori, dan pemaknaan temuan sesuai dengan empat aspek evaluasi yang menjadi fokus kajian. Cara ini memungkinkan peneliti untuk menautkan temuan lapangan dengan konteks kebijakan dan dinamika implementasi program PAUD di Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kuningan. Temuan diperoleh melalui analisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang menjadi sumber utama penelitian ini. Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikan di tingkat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 11 dijelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan, peran pemerintah, dan tanggung jawab daerah dalam mengembangkan pendidikan (Indonesia, 2003).

1) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan perluasan layanan PAUD di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan

pendidikan anak usia dini yang lebih merata, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang kuat pada tataran konteks wilayah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan PAUD yang diturunkan dari pusat hingga daerah belum sepenuhnya terdistribusi secara seragam ke seluruh kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami sulit melakukan tindakan selanjutnya, karena memang belum adanya kebijakan dari provinsi maupun kota. Mungkin dari pusat sudah mengeluarkan peraturan tentang standar pelayanan minimum, namun belum ada di peraturan Kab. Kuningan” (CWPD., Tny7., Jwb 1)

Pemerintah daerah telah menyusun program pembinaan dan pendampingan satuan PAUD serta mengalokasikan dukungan layanan sesuai arahan regulasi, namun capaian pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial-budaya masyarakat, kesiapan wilayah, dan perbedaan kapasitas lembaga di tingkat lokal. Faktor Ekonomi menjadi alasan yang paling banyak, karena di dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan seringkali diprioritaskan di atas pendidikan anak usia dini. Asumsi tersebut karena banyak biaya yang harus keluar ketika anak masuk dalam lembaga PAUD, seperti biaya pendaftaran, seragam, buku, dan transportasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Alasan ini menjadi alasan yang paling banyak, karena di dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan seringkali diprioritaskan di atas pendidikan anak usia dini. Asumsi tersebut karena banyak biaya yang harus keluar ketika anak masuk dalam lembaga PAUD, seperti: biaya pendaftaran, seragam, buku, dan transportasi” (CWPD., Tny7., Jwb 3).

Kondisi kesehatan juga menjadi faktor penghambat, ada beberapa kasus dimana anak mengalami kondisi yang memerlukan perhatian khusus (ABK). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ada beberapa kasus dimana anak mengalami kondisi yang memerlukan perhatian khusus (ABK). Biasanya anak dengan kondisi ini tidak mau sekolah karena malu atau menjadi bahan gunjingan” (CWPD., Tny7., Jwb 5)

Informan dalam penelitian ini menegaskan adanya wilayah yang tertinggal dalam menggerakkan layanan PAUD karena lembaga belum aktif melakukan jemput bola, dan dalam beberapa kasus pelaksanaan di lapangan berbeda-beda tergantung kemampuan kecamatan dan lembaga”. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam beberapa kasus, kendala geografis dan infrastruktur yang buruk bisa menghambat akses ke program ini, terutama di daerah terpencil” (CWPD., Tny7., Jwb 2)

Implementasi kebijakan PAUD di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa keberhasilannya tidak semata ditentukan oleh isi kebijakan, melainkan sangat bergantung pada konteks sosial tempat kebijakan tersebut dijalankan. *Approaches in developing countries need to pay particular attention to establishing social interaction processes between teachers, head-teachers, principals and education department personnel that positively reinforce the intended outcomes of the professional development strategy* (Thair & Treagust, 2003). Dalam kerangka CIPP, kondisi ini terutama berkaitan dengan aspek context, di mana perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan persepsi masyarakat memengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan. Wilayah pedesaan atau kawasan pinggiran yang belum memandang PAUD sebagai kebutuhan cenderung memiliki partisipasi lebih rendah meskipun program telah tersedia, sementara wilayah dengan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi menunjukkan pelaksanaan kebijakan yang lebih progresif. Hal ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan PAUD bersifat responsif terhadap konteks lokal dan baru dapat berjalan efektif ketika didukung oleh kesiapan sosial-budaya serta kemauan masyarakat untuk mengikutsertakan anak dalam layanan PAUD.

2) Persepsi Pemangku Kepentingan

Persepsi pemangku kepentingan baik pemerintah daerah maupun masyarakat menjadi salah satu input utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan peningkatan APS PAUD di Kabupaten Kuningan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap terhadap pentingnya PAUD masih beragam, yang berdampak langsung pada minat orang tua untuk mengikutsertakan anak dalam layanan pendidikan anak usia dini. Informan menyampaikan bahwa di sebagian wilayah, orang tua belum melihat PAUD sebagai kebutuhan mendesak, dan masyarakat masih memandang PAUD sebagai pilihan tambahan jika waktu dan biaya memungkinkan. Pernyataan tersebut diperkuat lagi dari persepsi orang tua yang sebagian besar memandang bahwa PAUD cukup diajarkan oleh keluarga saja. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagian orang tua mungkin tidak menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini untuk perkembangan kognitif dan sosial anak. Mereka mungkin melihat pendidikan formal sebagai sesuatu yang dimulai di sekolah dasar. Orang tua yang memiliki pengalaman pendidikan yang terbatas atau negatif mungkin kurang percaya pada manfaat PAUD” (CWPD., Tny7., Jwb 4).

Dalam kerangka evaluasi CIPP, unsur persepsi masuk ke dalam komponen Input, yaitu modal non material yang mempengaruhi kesiapan penerapan program. Input di sini tidak hanya berupa sumber daya fisik seperti anggaran atau tenaga pendidik, tetapi juga mencakup modal sosial berupa pengetahuan, sikap, dan nilai masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. Kondisi ini mengakibatkan minimnya alokasi anggaran dan sumber daya untuk pengembangan layanan PAUD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Tidak ada anggaran khusus untuk penanganan APS ini, mungkin karena memang belum ada regulasi yang jelas ya” (CWPD., Tny9., Jwb 1)

Penting juga bagi Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan untuk melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan orang tua dalam proses pendidikan anak usia dini. Pengetahuan pentingnya PAUD akan mendukung partisipasi anak dalam pendidikan ini. Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan perlu menciptakan program sosialisasi yang menjelaskan manfaat PAUD dan bagaimana peraturan yang ada mendukung pendidikan anak. Namun dengan alokasi anggaran yang sangat minim, Dinas Pendidikan tetap berupaya melakukan kampanye tentang pentingnya PAUD dengan cara mengikuti program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ketika SKPD ini melakukan kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan lainnya yang relevan dengan pendekatan ke masyarakat, maka kami akan mengajukan diri untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut” (CWPD., Tny9., Jwb 2)

“Fokus terhadap sosialisasi baik dari pentingnya PAUD sampai dengan proses pembelajaran. Untuk LMS saat ini belum ada” (CWPD., Tny11., Jwb 1)

“Peningkatan Sosialisasi dan Informasi Dinas melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya PAUD melalui media masa, media sosial, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat” (CWPD., Tny13., Jwb 1)

Dengan demikian, pembacaan persepsi melalui kerangka Input memperlihatkan bahwa tantangan peningkatan APS PAUD di Kabupaten Kuningan tidak semata-mata berasal dari hambatan struktural, tetapi juga dari kesiapan psikologis dan sosial masyarakat dalam memaknai PAUD sebagai kebutuhan. Melalui kampanye dan program yang lebih terstruktur, orang tua akan lebih memahami peran PAUD dalam perkembangan anak mereka. *Behavioral effects were significantly larger for interventions that begin with infant/toddlers or with preschoolers than for interventions that begin with children across the full age range* (Nores & Barnett, 2010). Pendidikan yang baik di usia dini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Sehingga hal ini akan mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pendidikan dan perkembangan anak di rumah, menciptakan sinergi antara pendidikan formal dan non-formal. Jika lingkungan sosial belum memandang PAUD sebagai sesuatu yang penting, niat perilaku untuk berpartisipasi menjadi rendah, terlepas dari ketersediaan program. Temuan Kuningan mendukung pola ini: intervensi struktural sudah ada, tetapi niat perilaku masyarakat belum terbangun kuat.

3) Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan peningkatan APS PAUD di Kabupaten Kuningan tampak dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya serta mekanisme pelaksanaan program di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas input dalam bentuk tenaga pendidik, dukungan anggaran, sarana layanan PAUD, dan koordinasi antar unit pemerintah belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kebutuhan wilayah yang luas dan beragam. Kesiapan Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan untuk mengimplementasikan kedua peraturan ini sangat bergantung pada komitmen dan kepemimpinan di tingkat daerah. Dinas Pendidikan harus mampu mengadaptasi kebijakan nasional menjadi program yang relevan dan aplikatif di wilayah mereka. Saat ini untuk kebijakan ada Peraturan Bupati Kuningan (Perbup) No 63 Tahun 2022 yang mewajibkan anak yang masuk kategori PAUD untuk mengikuti program PAUD selama satu tahun sebelum masuk ke SD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya untuk kebijakan ada Peraturan Bupati Kuningan No 63 Tahun 2022 yang mewajibkan anak yang masuk kategori PAUD untuk mengikuti program PAUD selama satu tahun sebelum masuk ke SD. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang kuat sejak dini” (CWPD., Tny5., Jwb 1).

Kesiapan Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan untuk mengintegrasikan PAUD dalam kebijakan pendidikan bisa menjadi kunci untuk merespons perbaikan infrastruktur dan kualitas layanan PAUD yang diinginkan oleh kedua peraturan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Penguatan sumber daya dan fasilitas Menyediakan fasilitas belajar yang memadai, seperti ruang kelas dan media pembelajaran yang relevan” (CWPD., Tny13., Jwb 2)

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang kuat sejak dini. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, Dinas Pendidikan memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi pendidikan yang komprehensif, yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan seterusnya.

Dalam kerangka CIPP, pola ini memperjelas kaitan langsung antara input dan process sebagai penentu keluaran program. Jika input kebijakan hanya terbatas pada penyediaan layanan dasar tanpa diiringi pelaksanaan yang responsif, maka dampaknya terhadap APS akan minim. Sebaliknya, input yang kuat dalam bentuk pendanaan, SDM, dan dukungan kelembagaan memungkinkan proses yang lebih intensif, termasuk penguatan komunikasi dengan masyarakat dan penjangkauan wilayah sulit akses. Temuan ini sejalan dengan teori governance dan implementasi pendidikan, yang menegaskan bahwa keberhasilan layanan publik, termasuk PAUD, ditentukan oleh kualitas kolaborasi antarpemerintah, penerima manfaat, dan pihak pendukung (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks Kuningan, kolaborasi ini belum berjalan optimal, sehingga beban implementasi sebagian besar berada di Dinas Pendidikan. Minimnya kemitraan desa dan sektor sosial lainnya menjadi faktor pembatas dalam proses peningkatan APS. Dengan demikian, faktor penentu keberhasilan bukan hanya berkaitan dengan tersedianya kebijakan atau lembaga layanan, tetapi juga sejauh mana aktor-aktor pendukung bersinergi dan melibatkan diri dalam penyelenggaraan PAUD. Kombinasi input yang memadai dan proses implementasi yang konsisten merupakan prasyarat penting untuk mendorong peningkatan APS secara signifikan.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menyediakan layanan PAUD yang berkualitas. Pemerintah dapat lebih memfokuskan sumber daya dan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur PAUD di daerah-daerah yang kurang terlayani. Duncan menjelaskan hasil penelitiannya yaitu *suggests the need to track rates of poverty among children—especially deep poverty occurring early in childhood—to inform policy discussions regarding children’s well-being* (Duncan et al., 2012). Pernyataan tersebut diartikan bahwa diperlukan identifikasi tentang tingkat kemiskinan dari setiap anak. Data ini diperlukan kolaborasi dari berbagai elemen peraturan baik dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.

4) Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan peningkatan layanan PAUD di Kabupaten Kuningan saat ini masih belum menunjukkan capaian hasil yang signifikan jika diukur dari tingkat partisipasi anak. Berdasarkan hasil wawancara dan koordinasi dengan Kemdikbudristek dan Dinas Pendidikan di wilayah Jawa Barat kabupaten Kuningan beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah anak usia dini diantaranya adalah dengan data yang dimiliki. Data yang digunakan menggunakan beberapa data diantaranya adalah data desa, data pembina, dengan data yang ada di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan sulit melakukan identifikasi dari data yang didapatkan, harapannya adalah bila data tersebut sama maka intervensi yang dilakukan bisa dilakukan secara cepat. Namun kondisi yang terjadi adalah data yang didapatkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan terkadang berbeda dari beberapa sumber. Sehingga kondisi ini membuat Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan masih dalam tahapan melakukan identifikasi data kembali, belum dalam tahapan intervensi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Di kami ada pembina PAUD di kab Kuningan. Untuk data ini kami mendapatkan sumber dari beberapa pihak, diantaranya adalah data desa, data pembina, dengan data yang ada di Dapodik. Data-data ini mungkin saja masih banyak perbedaan, dan perbedaan ini yang perlu dilakukan pengecekan secara mendalam” (CWPD., Tny1., Jwb 1)

“Namun bila ada perbedaan data ini, kami perlu identifikasi lagi dengan data yang ada di lapangan” (CWPD., Tny1., Jwb 2)

Dalam kerangka CIPP, efektivitas merupakan pencerminan Product, yakni sejauh mana hasil program selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam

konteks PAUD, indikator keberhasilan bukan hanya tersedianya layanan, tetapi meningkatnya keterjangkauan dan keterlibatan anak dalam layanan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian ini masih belum terpenuhi secara merata. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan keluaran nyata dalam bentuk peningkatan partisipasi anak. Persepsi orang tua untuk pendidikan menjadi salah satu faktor yang menghambat. Sebagian orang tua mungkin tidak menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini untuk perkembangan kognitif dan sosial anak. Orang tua mungkin melihat pendidikan formal sebagai sesuatu yang dimulai di sekolah dasar. Orang tua yang memiliki pengalaman pendidikan yang terbatas atau negatif mungkin kurang percaya pada manfaat PAUD. Bahkan ada yang dulunya tidak sekolah dianggap cukup, sehingga anaknya juga dirasa tidak perlu masuk jenjang PAUD.

Untuk mendukung semua faktor ini, Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan perlu memiliki alokasi anggaran. Upaya tersebut sebagai bentuk perencanaan peningkatan APS pada jenjang PAUD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dinas perlu mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” (CWPD., Tny13., Jwb 6)

“Peningkatan APS ini merupakan unsur dari multistakeholder, sehingga perlu melakukan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan komunitas untuk mendukung program ini” (CWPD., Tny13., Jwb 5)

“Menyelenggarakan pelatihan dan workshop berkala untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD dalam mengajar” (CWPD., Tny13., Jwb 3)

Keterbatasan efektivitas ini tidak terlepas dari dinamika Process yang masih beragam antarwilayah. Pada beberapa kecamatan, strategi implementasi berjalan aktif melalui sosialisasi dan penjangkauan; di tempat lain, pelaksanaan kebijakan lebih bersifat administratif dan pasif. Perbedaan niat dan kapasitas pelaksanaan ini berkontribusi pada keluaran program yang tidak setara. Secara evaluatif, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi oleh cara program tersebut dijalankan dan konteks penerapannya.

Jika kebijakan PAUD berjalan efektif dan APS meningkat, anak-anak akan memperoleh akses terhadap stimulasi pendidikan yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan usia dini. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Barnett yang menjelaskan bahwa *Preschool programs available improve cognitive development* (Barnett & Belfield, 2006). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman belajar di usia dini dapat mempengaruhi prestasi akademis dan kemampuan sosial anak di masa depan. Dengan mengintegrasikan PAUD sebagai bagian dari wajib belajar, kita bisa memastikan bahwa setiap anak mendapatkan stimulasi yang tepat dan merata. Dengan demikian, efektivitas kebijakan PAUD seharusnya berimplikasi langsung pada hasil perkembangan anak, bukan hanya pada peningkatan angka pendaftaran.

Untuk memperkuat hasil yang diinginkan dari pengembangan profesional dalam pengembangan mutu pendidikan jenjang PAUD, diperlukan kolaborasi

baik dari pimpinan sekolah, guru, dan unsur lain yang terlibat. Diharapkan dengan meningkatnya profesional guru dalam mengajar maka akan berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dengan begitu akan dapat menciptakan lulusan yang baik dan berkualitas (Sa'diyah, 2023). Keberhasilan kebijakan PAUD bukan hanya soal administrasi layanan, tetapi memastikan setiap anak memperoleh hak perkembangan optimal melalui pengalaman belajar yang kaya. Dengan demikian, rendahnya efektivitas kebijakan di Kabupaten Kuningan tidak hanya berdampak pada capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga pada hilangnya kesempatan perkembangan penting bagi anak usia dini yang belum berpartisipasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya (APS) Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kuningan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Selain kondisi ekonomi keluarga dan persepsi masyarakat terhadap urgensi PAUD, keterbatasan akses layanan, variasi kualitas lembaga, serta pelaksanaan kebijakan daerah yang belum sepenuhnya optimal turut memperkuat rendahnya partisipasi anak usia dini. Perspektif pemangku kepentingan pendidikan menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan layanan dan mendorong peningkatan partisipasi melalui berbagai program, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan jangkauan intervensi yang belum merata terutama pada kelompok sasaran rentan. Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan APS PAUD di Kabupaten Kuningan memerlukan langkah strategis berupa penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data dalam perencanaan program, perluasan dukungan pembiayaan, serta kampanye berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memastikan mutu dan keberlanjutan layanan PAUD di daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang sudah memberikan beberapa dukungan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- (BPS), B. P. S. (2023). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Provinsi, 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id>
- Asmara, Y. R. I., & Sukadana, I. W. (2016). Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (Studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali). *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1347–1383. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/23557/16727/>
- Barnett, W. S., & Belfield, C. R. (2006). Early Childhood Development and Social Mobility in China. *The Future of Children*, 16(2), 73–98. <https://doi.org/10.1177/20965311241240479>
- Duncan, G. J., Magnuson, K., Kalil, A., & Ziol-Guest, K. (2012). The Importance of Early Childhood Poverty. *Social Indicators Research*, 108(1), 87–98. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9867-9>

-
- Hakim, A. (2020). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122–132. <https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.907.2020>
- Indonesia, P. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. In *Sekretaris Negara Republik Indonesia*.
- Keguruan, F., & Pendidikan, I. (2017). *ISSN 1410 4695 Diterbitkan oleh*. 10.
- Kemendikbud. (2014). Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 6. <https://doi.org/10.33578/jpsbe.v10i1.7699>
- Kemendikbud. (2020). Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini 2019/2020. In *Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Kemendikbud. (2021). *APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SMA*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. *Kemdikbud*, 654, 1–9. www.peraturan.go.id
- Lanawaang, J. J., & Mesra, R. (2023). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1375–1381. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5103>
- Mendikbud. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 47 Tahun 2023 Tentang Standar pengelolaan Pendidikan. *Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*, 1–16. https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20230810_163641_2023pmkemdikbud47.pdf
- Nores, M., & Barnett, W. S. (2010). Benefits of early childhood interventions across the world: (Under) Investing in the very young. *Economics of Education Review*, 29(2), 271–282. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2009.09.001>
- Sa'diyah, H. A. (2023). Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Peningkatan Profesional Guru. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 1–12.
- Saepuloh, D., & Suherman, A. (2019). Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 18(2), 98–111. <https://doi.org/10.33592/pelita.v18i2.45>
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sofradzija, H., Sehic, S., Alibegovic, A., Bakic, S., & Camo, M. (2021). Education as a Process and Result. *International Journal of Contemporary Education*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.11114/ijce.v4i1.5190>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, & Applications* (Second). Library of Congress Cataloging-in-Publication
-

Data.

- Suharti. (2018). Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi pada PAUD Negeri Pembina Curup dan PAUD Pertiwi Kabupaten Rejang Lebong) Suharti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Pendahuluan Anak usi. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v2i1.397>
- Thair, M., & Treagust, D. F. (2003). A brief history of a science teacher professional development initiative in Indonesia and the implications for centralised teacher development. *International Journal of Educational Development*, 23(2), 201–213. [https://doi.org/10.1016/S0738-0593\(02\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0738-0593(02)00014-7)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (2002). Pasal 31 Ayat 1. *Jakarta*, 4(1), 1–12.
- Wassahua, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kampung Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon. *Al-Itizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 204–224. <https://doi.org/10.33477/alt.v1i2.199>